

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Venezuela merupakan negara yang berada di ujung utara Amerika Selatan. Penemuan minyak mentah pada tahun 1913 membuat Venezuela menjadi negara penghasil minyak dengan sumbangan cadangan devisa sebagian berasal dari minyak. Pada tahun 1920, produksi minyak kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama AS. Seiring berjalannya waktu awal tahun 1970-an dan lebih tepatnya tahun 1976 program nasionalisasi minyak di resmikan. Peningkatan dan volatilitas lebih besar dari harga minyak tahun 1974 menyebabkan pendapatan tidak terduga dari negara Venezuela. Peningkatan ini berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Venezuela yang terus mengalami kenaikan dari tahun 1960-1970 an, namun dekade setelah itu perekonomian Venezuela terus menurun.

Secara garis besar negara Venezuela terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 1970, namun semua itu berubah pada tahun setelahnya diakibatkan adanya gangguan pada perekonomian Venezuela. Elemen penting dari dalam pertumbuhan yang relative rendah adalah proses nasionalisasi industri minyak. Perburukan ekonomi tidak hanya karna adanya factor penurunan harga minyak saja, namun juga faktor politik.

Saat ini, Venezuela sedang menghadapi banyak masalah: krisis listrik dan air, rakyat terpaksa membeli daging busuk, menjual rambut demi uang, dan jutaan rakyatnya kabur ke negara lain.

Dilansir dari BBC, pada awal tahun 2021, dikabarkan wanita Venezuela sampai harus berjuang ekstra demi bertahan pada situasi sulit. Bagaikan Fantine di cerita Prancis Les Misérables, wanita di Venezuela sampai menjual rambutnya. Harga rambut yang dipotong langsung dari pemiliknya dibanderol hingga 45 pound sterling. Pembeli adalah pria paruh baya bernama Luis Fernando. Ia berharap, uang yang para perempuan dapat lewat menjual rambut dapat meningkatkan hajat hidup mereka.

Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Venezuela melambung jauh dari pendapatan masyarakatnya, angka pengangguran meningkat tajam, dan terjadi hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diperkirakan sekitar 4 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya menjadi imigran gelap di negaranegara tetangga.

Di tengah krisis yang tersebut, Nicolas Maduro berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan memperoleh 67,7 persen suara, sementara di posisi kedua Henri Falcon, memperoleh 21,2 persen suara. Sedangkan di posisi ketiga ada Javier Bertucci sekitar 11 persen suara. Dan Nicholas Maduro resmi dilantik sebagai presiden Venezuela pada 19 Januari 2019. Akan tetapi, Kelompok oposisi Henri Falcon melakukan protes keras pada hasil pemilu yang dinilai tidak sah dan sempat memboikot tempat pemungutan suara di Venezuela pun diguncang unjuk rasa dan protes dari rakyat yang mendukung kelompok oposisi.

Pemilu Venezuela pada 2018 yang dianggap curang tersebut dijadikan Presiden Trump sebagai basis untuk mengerahkan embargo. AS telah mendeklarasikan dukungan kepada tokoh oposisi Juan Guaidó sebagai presiden interim.

"Mengingat adanya perebutan kekuasaan oleh rezim Nicolás Maduro yang tidak sah, serta pelanggaran HAM di rezimnya, adanya penahanan sewenang-wenang terhadap warga Venezuela, dan pembatasan kebebasan pers, dan usaha terus-menerus untuk menjegal Presiden interim Juan Guaidó dan Majelis Nasional Venezuela yang terpilih secara demokratis," jelas Trump dalam suratnya kepada Kongres AS.

Embargo sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keadaan pemutusan larangan lalu lintas barang (antarnegara). Lebih lanjut, embargo juga dapat diartikan yakni larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan.

Dilaporkan The Wall Street Journal, keputusan ini berdasarkan perintah eksekutif (executive order) yang membekukan aset pemerintah Venezuela dan entitas terkait serta melarang transaksi ekonomi dengannya kecuali dengan alasan khusus. Pengecualian tersebut mencakup bisnis resmi pemerintah federal dan transaksi yang terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan dan juga melarang transaksi dengan negara tersebut. Langkah ini selaras dengan pernyataan Presiden Trump sebelumnya untuk lanjut memberi sanksi ke Venezuela yang didukung Iran dan China. Dengan ini, Venezuela sudah satu level dengan Korea Utara, Iran, Suriah, dan Kuba yang mendapat sanksi serupa.

Sanksi akan menimpa semua individu atau perusahaan, baik perusahaan asing atau asal AS, yang berbisnis atau memberi dukungan bagi siapa pun yang terafiliasi dengan pemerintahan Nicolás Maduro.

Bulan Januari 2019, Amerika Serikat mengumumkan pengakuannya tentang pemimpin majelis nasional Venezuela Juan Guaidó sebagai satu-satunya pemimpin sah Venezuela setelah kemenangan Maduro dalam pemilu 2018 yang secara luas dikecam telah dicurangi. Lima puluh empat negara di dunia telah turut memberikan pengakuan.

Guaido yang awal Januari 2019 resmi dilantik sebagai ketua Majelis Nasional pada 23 Januari 2019 menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya. Guaido menuduh Maduro telah merebut kekuasaan dan menuding terjadi kecurangan pada proses pemilu 2018. Kepresidenannya langsung diakui oleh beberapa negara asing.

Venezuela disebut sebagai negeri dengan ‘dua’ matahari, dimana adanya dwikepemimpinan di negara sosialis ini. Presiden Nicolas Maduro dan Juan Guaido masing-masing merasa paling berhak memimpin negara. Dalam hal ini banyak negara-negara besar yang menyorot dan mengamati kepemimpinan Maduro ini. Maduro di dukung oleh pemimpin negara-negara kawasan, seperti Meksiko, Bolivia, dan Kuba. Dukungan yang sama juga diperolehnya dari negara-negara besar, semisal Turki, Cina, dan Rusia. Moskow bahkan baru-baru ini memperingatkan AS agar tidak

mencampuri urusan internal Venezuela. Sementara Guaido di dukung langsung leh Amerika Serikat dan tujuh negara Amerika Selatan yaitu seperti Brasil, Kosta Rika, Argentina, Peru, Kolombia, Ekuador, dan Cile. Demikian pula dengan Kanada, Spanyol, dan Inggris. Adapun Uni Eropa cenderung mengambil jalan tengah, yakni meminta segera digelar nya pemilu yang bebas dan dapat dipertanggungjawabkan di Venezuela.

Selain itu, AS mengajak militer dan pasukan keamanan lainnya untuk memihak Guaido. Namun, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino merespon dengan menegaskan militer tidak akan menanggalkan sumpah setia mereka kepada Maduro. Keberpihakan AS terhadap oposisi Venezuela ini dapat memicu terjadinya perang saudara dan kemungkinan buruk lainnya di kemudian hari. Intervensi AS ini merupakan bentuk intervensi internal suatu negara yang akan berakibat fatal terhadap pemerintahan Venezuela.

Sejak awal krisis politik Venezuela tahun 2019, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 100 individu dan entitas, termasuk perusahaan minyak milik negara *Petróleos de Venezuela SA*, Bank Pembangunan Venezuela, dan bank sentral Venezuela.

Langkah baru itu mengancam akan menargetkan dan menjatuhkan sanksi pada hampir semua perusahaan atau individu, milik asing maupun Amerika Serikat, yang terlibat dalam bisnis atau menawarkan dukungan kepada siapa pun yang berafiliasi

dengan pemerintah Maduro, menurut pejabat itu. Langkah itu tidak dirancang untuk menargetkan rakyat Venezuela, termasuk akses mereka ke transfer uang.

Pemerintah Trump juga sedang bekerja untuk mengajak berbagai negara untuk mengisolasi rezim Maduro demi menggesernya dari kekuasaan. Australia, Britania Raya, Kanada, Australia, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Portugal, Swedia, dan berbagai negara Amerika Selatan seperti Argentina, Brasil, dan Chile, ikut mendukung Guaidó. Tetapi negara seperti Rusia, China, dan Turki masih mendukung Maduro.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, juga mendukung embargo besar-besaran ini. Ia menilai langkah yang sama telah sukses di Panama dan Nikaragua, dan ia percaya juga akan berfungsi di Kuba dan Venezuela.

Pemerintahan sosialis Venezuela telah gagal membangun ekonomi berkelanjutan. Inflasi besar-besaran terjadi, ada krisis energi, dan tercatat ada empat juta rakyatnya yang kabur ke negara lain. Ini menjadikan kondisi Venezuela sebagai krisis kemanusiaan terburuk di belahan bumi Barat.

John Bolton, penasihat keamanan nasional Trump berpidato di Konferensi Internasional tentang Demokrasi di Venezuela mengatakan akan mengutuk dukungan Rusia dan China untuk Maduro sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Bolton juga akan menggarisbawahi apa yang dia katakan sebagai keberhasilan embargo ekonomi di Belahan Barat di masa lalu, menurut salinan awal pidato yang

dilihat oleh The Wall Street Journal. “Embargo telah bekerja di Panama dan Nikaragua, dan itu akan bekerja di sana lagi, dan itu akan bekerja di Venezuela dan Kuba!” katanya dalam sambutan yang telah disiapkan.

Kemiskinan dan kejahatan yang meluas telah mendorong banyak rakyat Venezuela tahun 2019 untuk menggelar protes untuk menuntut pembatalan kemenangan Maduro dalam pemilu 2018, yang telah memerintah negara itu sejak tahun 2013. Para ekonom menuduh bahwa krisis keuangan negara itu selama bertahun-tahun diakibatkan oleh tindakan salah kelola pemerintah. Sekitar empat juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu, menurut PBB, menjadikannya krisis kemanusiaan terburuk di Belahan Barat.

Sarana utama untuk menekan Maduro, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi tegas kepadanya dan para anggota rezimnya, serta pada sektor minyak dan industri emas Venezuela.

Tekanan internasional semakin menekan sistem produksi minyak Venezuela yang telah buruk, mengakibatkan penurunan hampir 50 persen dalam produksi dari tahun 2018, menurut angka yang dilaporkan bulan Juli 2019 oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross pekan lalu menyusun rencana ekonomi pasca-Maduro untuk Venezuela yang akan mencakup sumber-sumber kredit dan investasi yang dibutuhkan, merehabilitasi sektor swasta yang lumpuh di negara itu, memulihkan produksi minyak, menghidupkan kembali pertanian, dan mengembangkan pembiayaan.

Dilansir dari The Wall Street Journal, Maduro telah mengabaikan seruan untuk mundur dan menahan tekanan internasional untuk menyerahkan kekuasaan kepada Guaidó dengan mempertahankan dukungan militer Venezuela dan menyambut dukungan dari negara-negara yang masih mendukungnya.

Terlepas dari adanya kampanye tekanan, pemerintahan Trump bulan Juli 2019 telah memperpanjang lisensi yang memungkinkan Chevron Corp. untuk tetap berada di Venezuela sampai akhir Oktober 2019, berpihak pada pejabat pemerintahan AS yang berpendapat bahwa ketidakhadiran perusahaan akan menempatkan perusahaan energi Amerika itu berada di posisi yang kurang menguntungkan dan tidak secara signifikan memajukan tujuan Amerika Serikat untuk menyingkirkan Maduro.

Sejumlah sanksi baru, dengan menargetkan perusahaan pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan pemerintah Maduro, dimaksudkan untuk mempengaruhi tidak hanya perusahaan itu tetapi juga bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain yang bergabung dengan mereka atau dengan para pelanggan dan klien mereka di Venezuela.

Namun, langkah-langkah tersebut, yang dikenal sebagai sanksi sekunder, tidak dapat dipastikan akan berhasil, menurut beberapa analis.

“Sanksi sekunder akan menjadi langkah signifikan, merampas pemasukan minyak dan emas yang sangat dibutuhkan rezim,” ujar Benjamin Gedan, penasihat pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama dalam masalah Amerika Latin. “Tapi masih belum jelas apakah sekutu-sekutu Venezuela akan mematuhi sanksi



sekunder,” kata Gedan, yang saat ini menjadi penasihat di Wilson Center, sebuah think tank yang berbasis di Washington. “Gedung Putih telah mengalami kesulitan untuk menegakkan sanksi Iran. Untuk sanksi Venezuela, bahkan para sekutu yang memiliki posisi sama dengan AS seperti Eropa dan Amerika Latin masih belum mengoordinasikan kebijakan sanksi.”

Embargo serupa di Iran dan Kuba tidak menghalangi China, Rusia, dan negara-negara lainnya untuk melakukan bisnis dengan negara-negara itu, menurut para ahli. Para pengamat dari luar juga memperingatkan bahwa sanksi besar dan sanksi sekunder terhadap Venezuela dapat memperburuk krisis ekonomi dan memberi amunisi bagi Maduro untuk menyalahkan Amerika Serikat atas kesengsaraan yang dialami bangsanya.

Semakin peliknya permasalahan dari kedua negara tersebut, maka penulis menaruh perhatian untuk menganalisis permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DAMPAK EMBARGO AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS VENEZUELA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Amerika Serikat memberikan sanksi embargo kepada Venezuela?

2. Bagaimana krisis politik dan ekonomi dapat terjadi di Venezuela?
3. Apakah pemberlakuan embargo mempengaruhi krisis Venezuela?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang di jelaskan diatas, penulis perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini akan dibatasi pada jangkauan pembahasan, “dampak embargo total yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di Venezuela pada kurun waktu 2018-2020”.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh embargo total yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap krisis Venezuela”**.

### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana krisis yang terjadi di Venezuela,

2. Untuk mengetahui penyebab pemberlakuan embargo oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela,
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan embargo Amerika Serikat terhadap krisis Venezuela.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

#### **1.5.2.1 Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam program studi hubungan internasional, khususnya tentang kebijakan embargo dan politik luar negeri sebuah negara terutama Amerika Serikat dan Venezuela, dan juga hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan literatur kepustakaan di bidang kajian yang diteliti.

#### **1.5.2.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.

2. Hasil peneltian ini diharapkan mampu menambah minat masyarakat untuk lebih menggali bagaimana dampak dari suatu kebijakan terhadap situasi suatu negara. Terkhusus dalam bahasan ini dampak embargo terhadap suatu negara.
3. Menjadi media dan sumber utuk mengimplikasikan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah kedalam suatu bentuk karya tulis ilmiah.
4. Penelitian ini di harapkan untuk memberikan sumbangan informasi data, fakta dan kebenaran mengenai fluktuasi sistem politik yang terjadi di Venezuela dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna dan referensi bagi penelitian selanjutnya juga sebagai masukan guna meningkatkan kurikulum yang sepadan dengan kebutuhan dalam dunia kerja.